

Ilmu politik, sains, dan profesionalisasi: Indonesia dan perkembangannya

Political science, science, and professionalization: Indonesia and its development

M. Faishal Aminuddin^{1*}, Luthfi Makhasin², Panji Anugrah Permana³

¹Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia

²Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia

*E-mail: mfaishal@ub.ac.id

Article History: Received 10 August 2025; Accepted 29 September 2025

Abstract: Political science, as a developing discipline, continues to spark debates regarding its scientific foundations. Its expansion into professional and practical domains has yet to establish universally applied standards. This article discusses the dynamics and development of political science by analyzing its scientific basis, areas of study, and historical trajectory. More specifically, it highlights the discipline's growth in Indonesia. As a relatively young field of study, its development in the democratic era offers hope for the consolidation of political science as a discipline with clearer standards, contributions, and directions for advancement that are connected to global dynamics.

Keywords: Political science, Indonesia, professionalization, science.

PENDAHULUAN

Pengembangan Ilmu Politik membutuhkan ruang yang bebas sehingga dalam negara-negara penganut demokrasi liberal, Ilmu Politik bisa berkembang dinamis dan leluasa menganalisis eksistensi negara, mekanisme check and balances, pemisahan kekuasaan, akuntabilitas sampai kompetisi politik (Goodin & Klingemann, 1996). Pertanyaan kunci untuk membuka ruang lingkup kajian Ilmu Politik adalah apakah kekuasaan itu? Diktum populer dari Harold Lasswell (1936) bahwa politik adalah “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana?” sebenarnya memberikan petunjuk terang mengenai kontestasi kekuasaan dan redistribusi sumber daya publik sebagai jantung obyek kajian.

Kami ingin menarik garis pembatas yang lebih bersifat definitif bahwa Ilmu Politik adalah sebuah studi sistematis terhadap keterhubungan logis aspek-aspek ideal dan material dari kekuasaan. Diskusi mengenai state of the art Ilmu Politik adalah usaha untuk menegaskan obyek inti kajian Ilmu Politik dan irisan-irisannya dengan disiplin keilmuan lainnya seperti hukum, Ilmu-ilmu sosial humaniora, ekonomi dan yang lainnya. Interaksi dengan kajian lainnya, membuat keragaman dalam pendekatan obyek kajian, pembangunan teori dan pilihan-pilihan metodologis. Dalam kontestasi kekuasaan, misalnya, juga melibatkan konflik kepentingan yang didominasi oleh strategi persuasif, bujuk rayu,



manipulasi dan cara-cara lainnya untuk mendapatkan kemenangan (Lukes, 1974). Menganalisis hal-hal tersebut, sebagaimana ilmu sosial lainnya, memerlukan perangkat yang terukur, sistematis dan reliable serta validitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Artikel ini menjawab pertanyaan apa yang bisa dipahami dari dinamika dan perkembangan disiplin ilmu politik secara global? Apakah hal tersebut memberikan pengaruh terhadap konteks Indonesia? Dari pertanyaan tersebut, artikel ini menguraikan ilmu politik sebagai disiplin ilmu dan profesionalisasinya. Bagian ini merupakan aspek mendasar untuk mendapatkan pemahaman mengenai struktur politik sebagai sains dan aspek praktisnya. Lalu dilanjutkan dengan uraian tentang konsep kunci dalam studi politik serta ruang lingkup wilayah kajian dan aplikasinya. Setelah itu, deskripsi dan analisis terhadap dinamika dan perkembangan disiplin ilmu politik di Indonesia akan diuraikan. Tujuan artikel ini secara umum adalah memahami standar yang digunakan secara umum dalam pendidikan ilmu politik di perguruan tinggi dan klasifikasi profesional yang terhubung dengannya.

Ilmu Politik: Disiplin dan profesionalisasi

Landasan saintifik

Ilmu politik (Sains politik) didasarkan pada dua arah: sains politik dilihat sebagai “*body of knowledge*” dan sebagai “*a method of obtaining it*”. Pertama, kategori saintifik dalam sains politik termasuk hukum atau dalil. Kedua, sains merupakan seperangkat prinsip yang mengatur cara bagaimana mendapatkan fakta (Isaak, 1981, p. 26). Keduanya tidak perlu dipertentangkan karena nilai saintifik bisa didapatkan melalui metode yang disusun dengan prinsip-prinsip sains yang ketat dan fakta yang diduplikasinya. Sebagai sebuah disiplin keilmuan, ilmu politik memiliki justifikasi filsafat ilmu yang sebenarnya merupakan kepanjangan dari ilmu-ilmu sosial secara umum. Sekalipun tidak menutup pada pengaruh yang diberikan oleh ilmu-ilmu humaniora seperti sejarah, antropologi dan sejenisnya.

Dari sisi epistemologis, penyelidikan ilmiah harus diidentifikasi dengan teori dan metode yang bekerja melampaui analisis logis belaka dari hubungan antara pernyataan-pernyataan ilmiah yang memberi perhatian pada pemilihan metode. Perbedaan pertama yang harus kita buat adalah antara sains formal dan sains empiris. Sains formal terdiri dari pernyataan analitik yang ditetapkan oleh logika dan matematika; ilmu empiris terdiri dari pernyataan sintetik yang didirikan di berbagai bidang pengetahuan faktual (Hempel, 1952). Teori formal merupakan salah satu dari kelompok metode penting dalam disiplin ilmu politik yang mengklaim dirinya lebih mendekati pengertian sains dalam studi politik dan berkomitmen tinggi terhadap aspek prediksi yang presisi dan simplisitas dalam penjelasan (Kramer & Weisberg, 1986, p. 12).

Mengenai metodologi, secara sederhana bisa disebut sebagai prinsip yang menjadi pegangan bagi segenap upaya untuk mendapatkan penjelasan atas apa yang menjadi pertanyaannya. Jika tidak ada prinsip untuk menggambarkan mengenai riset dan cara menjelaskannya, maka tidak ada yang namanya

metodologi (Miller, 1983). Metode saintifik politik dikarakteristikan oleh tiga hal. Pertama, asumsi ilmiah bahwa segala hal terkait oleh determinisme atau hukum kausalitas universal. Kedua, basis empiris yang mempunyai implikasi terhadap jumlah fitur, termasuk dasar observasi, intersubjektivitas dan bebas nilai. Ketiga, sistematis, berupa formulasi, verifikasi terhadap generalisasi empirik, pembangunan teori yang sistematis, penjelasan dan prediksi. Ilmu politik harus mempunyai setidaknya tiga karakter tersebut untuk bisa disebut saintifik (Isaak, 1981, p. 52).

Sains politik berupaya untuk membangun teori dimana prediksi dan kendali (*control*) menjadi pilar pentingnya untuk memahami dunia nyata. Ambisi saintifik ini mengacu pada pemahaman “sains lunak” karena fenomena dan realitas sosial bersifat dinamis sekalipun terikat pada hukum sebab-akibat (*causality*). Secara longgar, sains lunak ini jelas harus dibedakan dengan sains keras seperti Fisika, Biologi dan Kimia misalnya. Sekalipun kedua jenis sains tersebut bisa dirangkum oleh pengertian yang sama sebagaimana disebutkan Einstein (1950) bahwa sains merupakan usaha untuk membuat beragam gejala ketidakberaturan (*chaotic*) yang dicerap oleh sensitivitas manusia agar berhubungan dengan logika sistem pemikiran.

Fenomena dan dunia nyata yang kompleks juga dianggap terlalu sederhana jika direduksi oleh penggunaan teori formal. Dunia sosial politik tidak bisa begitu saja dijelaskan dengan metode saintifik yang mengabaikan faktor-faktor yang tersembunyi dalam detail yang tidak mungkin ditangkap dan disajikan dalam data-data kuantitatif. Riset empiris yang kuantitatif, kemudian dilihat lebih mudah dijalankan. Selama ada data baru yang ditambahkan dalam data-data sebelumnya, setiap peneliti bisa membuat hipotesis yang diuji dengan menganalisis data-data tersebut. Hanya persoalan akan muncul ketika terdapat persoalan dalam ketersediaan data. Bagaimana mungkin bisa menguraikan kompleksitas fenomena? (Strauss, 1962). Penyelidikan sosial bertujuan menghubungkan tradisi konvensional dari penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menerapkan logika inferensi yang berlaku untuk keduanya. Kesamaan logika dari keduanya bertujuan untuk menyediakan framework penelitian diantara keduanya dengan lebih baik (King et al., 1994, p. 3).

Kendatipun ambisi saintifik ini mendapatkan tantangan dari pandangan alternatif sehingga terdapat kesulitan tersendiri untuk memetakan dan memposisikan Ilmu Politik dan perangkat metodologinya dalam rangka memenuhi ambisi saintifik tersebut. Bagi kelompok humanis misalnya, mereka sejauh mungkin menghindari saintisme dan menolak dominasi statistik dalam riset Politik. Atau kelompok radikal yang fokus pada memosisikan kritisisme dalam teori dan cenderung bersikap anti-profesional dan condong beraktivitas sebagaimana politisi (Almond, 1990, p. 14). Disiplin Ilmu Politik mempunyai subyek kajian yakni exercise of power dan konsekuensinya terhadap masyarakat melalui seperangkat asumsi, konsep, teori dan metode. Karakteristik sains dalam politik setidaknya bisa dilihat dari pondasinya yakni: Agen, Unit, Motif, Mekanisme, rezim, Metode dan Teori (Schmitter, 2010). Dalam beberapa hal, analisis empirik sering memasukkan nilai normatif sebagai justifikasi. Dalam masa

selanjutnya, pengaruh dari sosiologi dan psikologi dalam perkembangan ilmu politik ditandai dengan penerimaan behaviorisme yang menggunakan teknik analisis kuantitatif terutama statistik dalam menganalisis perilaku politik. Sedangkan pengaruh ilmu ekonomi melahirkan model formalis, seperti matematika dan ekonometrika. Kontribusi dari berbagai bidang ilmu tersebut bersifat kumulatif dan menghasilkan karakteristik baru Ilmu Politik sebagai bidang kajian saintifik yang setidaknya mensyaratkan: observasi empiris, pengukuran kuantitatif dan pemodelan logis dengan memasukkan hipotesis kedalamnya.

Pada era perkembangan politik sebagai disiplin ilmu tahun 1950-an, studi ilmiah tentang politik terasosiasi dengan pendekatan bebas nilai yang berkepentingan untuk menjawab pertanyaan “apakah” bukan “apa yang seharusnya” dari realitas politik sehingga menjadikannya sebagai ilmu yang membedakannya dengan filsafat politik (Gerring & Yesnowitz, 2006). Ilmuwan politik yang empiris lebih fokus pada usaha untuk menjawab “apakah” sekalipun dari aspek filosofis, menjawab pertanyaan tersebut tanpa menyertakan alasan-alasan filosofis juga menjadi dangkal. Kepentingan untuk melakukan elaborasi konseptual, preskripsi, menguji determinasi dan menerapkan standar etik dalam sebuah kerangka pemikiran menjadi hal-hal yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Mahasiswa jurusan politik cenderung mempersiapkan dan mendeskripsikan nilai sebagai data empiris namun ilmuwan berkepentingan untuk menjauhi preskripsi dimana justifikasi nilai yang menjadi latar belakang risetnya, ditentukan sedari awal (Dahl 1961, p. 770-771).

Terdapat empat klasifikasi dalam melihat perkembangan Ilmu Politik yakni: 1) sejarah dan keunikan tradisi keilmuan dari kampus atau mazhab tertentu. 2) sejarah berkembangnya penggunaan teori dan metode yang mengikuti keberhasilan ilmuwan politik dalam membangun seperangkat teori atau temuan metodologi yang khas. 3) ruang pertemuan gagasan dan sharing of knowledge melalui organisasi-organisasi profesional Ilmu Politik lintas kawasan dan negara. 4) perkembangan kolaborasi antar institusi dalam pengembangan metode penelitian Ilmu Politik. Keempat klasifikasi tersebut untuk lebih memahami sejarah secara diakronik dan saling memberi pengaruh, dinamis dan terkadang asimetris. Dengan demikian, keberadaan seorang ilmuwan atau institusi yang berkembang dalam satu negara atau kawasan tidak serta merta memberikan pengaruh tunggal pada wilayah lain. Hubungan resiprokal bisa diidentifikasi dengan lebih baik sehingga masing-masing ilmuwan atau institusi dalam sebuah kawasan bisa diketahui menyumbangkan temuan yang khas sesuai konteks lingkungannya.

Perkembangan

Pengembangan Ilmu Politik sebagai sebuah disiplin tidak lepas dari perkembangan ilmu sosial. Di Eropa, Ilmu sosial sudah mulai muncul sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri semenjak studi-studi klasik tentang masyarakat, lembaga dan interaksinya dilakukan secara sistematis. Pada periode 1800 sampai akhir 1930 an, Eropa Barat menjadi pusat persemaian ilmu sosial dan mencatatkan banyak karya-karya yang menjadi dasar bagi ilmu sosial modern. Di Perancis dan Jerman, para pengajar di



universitas menikmati kebebasan akademik dan jaminan untuk mendiseminasikan hasil riset mereka. Misalnya di Perancis pada era Republik Ketiga antara tahun 1870-1940 dimana kehidupan berjalan secara demokratis, memunculkan banyak nama-nama penting dalam Ilmu Sosial seperti Emile Durkheim. Demikian juga Republik Weimar di Jerman antara 1918-1933, sekalipun singkat, namun berdampak besar bagi perkembangan ilmu sosial dengan masyarakatnya yang liberal dan pemerintahan yang demokratis. Tradisi keilmuan yang dibangun di Eropa banyak berakar dari sejarah, sosiologi dan filsafat sementara di Amerika mempunyai hubungan kuat dengan psikologi sosial dan ekonomi (Norris, 1997, p. 18).

Di Amerika Serikat, perkembangan disiplin Ilmu Politik berlangsung lebih cepat dengan 1) munculnya mazhab Chicago (1920-1940) yang mengusung program riset empiris yang lebih terorganisir, menekankan pada interpretasi sosiologis dan psikologis dari politik serta mendemonstrasikan nilai kuantifikasi. 2) Gelombang Behaviorisme pasca Perang Dunia kedua diikuti dengan profesionalisasi Ilmu Politik, peningkatan pengakuan sebagai sub-disiplin. 3) Diadaptasinya metode deduktif dan matematik dari ekonometrik menghasilkan metode rational choice dan pendekatan metodologis yang bersifat individual (Almond, 2002). Sidelman (1985) mencatat tiga tren teori politik yakni: 1) Tren Institusionalis yang digawangi oleh Chicago School yang berkembang sampai periode tahun 1970-an. Tren ini membawa tradisi Hamilton-Madisonian dimana fokus topik dan nilai risetnya pada aspek sistem konstitusional dalam demokrasi. 2) Tren Demokrasi-Populis yang membawa tradisi Thomas Paine yang anti-statis dan anti-pemerintahan. 3) Tren Ilmu Politik yang mengusung kemungkinan studi politik secara saintifik yang bertujuan untuk membantu menopang negara bangsa yang kuat.

Hubungan erat antara ilmuwan sosial di Eropa dengan Amerika menarik untuk dilihat. Ilmuwan sosial di Eropa lebih banyak menghasilkan teori dan mengolah gagasan tentang politik dalam spektrum yang mengerucut pada eksistensi negara. Sementara dalam bidang lainnya, perkembangan ilmu bantu yang lain seperti statistik yang sudah diletakkan oleh Condorcet, Bayes, Pareto atau Markov, belum banyak dimanfaatkan. Ilmu-ilmu bantu tersebut sebaliknya, dimanfaatkan dalam level metode analisis oleh Ilmuwan sosial di Amerika. Aplikasi metode kuantitatif dalam studi sosial politik mulai banyak digunakan dalam bentuk penelitian survei, statistik agregat dan model matematika. David Ricci (1984) memberikan penilaian kritis bahwa munculnya madzhab saintifik liberal pasca Perang Dunia Kedua di Amerika menghasilkan dominasi nilai liberal pluralistik dengan asumsinya atas metode yang presisi dalam mencapai validitas teori politik empirik. Beberapa tokohnya antara lain seperti Robert Dahl, C.E Lindbloom, madzhab Michigan yang fokus pada studi tentang voting. Implikasinya, Ilmu Politik sebagai sains empirik tanpa inklusi yang sistematis atas persoalan moralitas dan nilai etik serta rendahnya komitmen pada tindakan sosial.

Proyek unifikasi landasan saintifik yang diikuti dengan penyeragaman metodologinya menjadi karakter dari riset empirik. Sekalipun demikian, butuh kehati-hatian sebab realitas sosial politik yang kompleks

akan sulit jika hanya dilakukan oleh eksplanasi ilmiah tunggal. Dalam logika Popperian, dunia fisik mempunyai sistem terbuka sehingga eksplanasi sebagaimana ilmu fisika misalnya tidak memungkinkan dilakukan sepenuhnya. Realitas sosial politik dibentuk oleh manusia dan fenomena kultural. Terus bergerak kreatif dan berkembang. Yang bisa dilakukan adalah menambah pemahaman yang lebih akurat terhadap berbagai hukum, interaksi dan hubungan-hubungan sebab akibat dalam realitas yang menjadi obyek eksplanasi.

Perkembangan terbaru setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, menyebabkan pendekatan Amerika muncul sebagai pendekatan dominan yang mempengaruhi Eropa Daratan dan Inggris. Kendatipun berbagai perkembangan di dalam negeri tidak bisa dipungkiri, memberikan kontribusi yang menyebabkan keunikan pada masing-masing pendekatan. Di Jerman misalnya, studi politik mulai terbentuk dan mengalami fragmentasi yang menarik. Klaus von Beyme (1982:170) menerangkan setidaknya terdapat empat school of thought: 1) Freiburg School yang membawa pendekatan normative-ontologis, digawangi oleh Arnold Bergstraesser yang meluas sampai ke Munich termasuk Eric Voegelin yang menjadi pioneer pendekatan kedua, yang membawa tradisi liberal institusionalis dengan tokoh-tokohnya antara lain Dolf Sternberger, Ernest Frankel, dan Carl J. Friedrich dari Heidelberg-Harvard, 3) membawa pendekatan metodik behavioralis yang terpusat di Koln dan Mannheim serta 4) pendekatan Marxian di Marburg dengan tokohnya Wolfgang Abendroth. Setelah 1980 an, beberapa sarjana imigran membawa pendekatan Amerika ke Jerman dan menghasilkan studi politik di Jerman terlihat lebih responsif terhadap metode saintifik.

Penyebaran ilmu politik, ditandai dengan adanya profesionalisasi dimana proses pendidikan dengan spesialisasi dan spesifikasi bidang keahlian, menghasilkan kalangan profesional yang bekerja sebagaimana keahliannya. Baik di dalam lembaga pendidikan sebagai penerus tradisi keilmuan dan menghasilkan riset-riset yang bermutu. Atau juga bekerja di dalam lembaga-lembaga pemikiran atau think tank yang aktif dalam perubahan kebijakan dan menyasar opini publik dalam bidang-bidang yang lebih praktis. Profesi kesarjanaan ilmu politik mengalami kemajuan pesat terutama setelah peran dunia kedua. Sekalipun masih terbatas pada kemajuan yang bisa dicatat dari hasil pelatihan dan pendidikan profesional di Amerika Serikat saja. Di negara tersebut, prosesnya terjadi lebih awal seiring dengan pendirian asosiasi profesional American Political Science Association (APSA) pada tahun 1903. Menyusul kemudian, paling tidak sampai akhir 1950-an, profesionalisasi Ilmu politik sudah berkembang juga di Eropa Barat yang ditandai dengan berdirinya program studi ilmu politik sebagai lembaga yang terpisah dari studi hukum, sejarah dan ilmu sosial yang umum (Norris, 1997, p. 18).

Kebutuhan untuk membangun jejaring profesional pada akademia dan sarjana Ilmu Politik dengan tujuan memperkuat kerjasama dalam pengembangan keilmuan dan profesi, kemudian melahirkan European Consortium for Political Research (ECPR) pada tahun 1970. Organisasi profesional ini, sampai tahun 2005, sudah mempunyai anggota sebanyak 698 jurusan ilmu politik dan sejenisnya, pusat

studi dan pusat akademik dibidang ilmu politik di seantero Eropa yakni sebanyak 347 buah di Eropa Barat dan 351 di Eropa Tengah-Timur (ecpr, 2018)¹. ECPR secara aktif mengadakan berbagai publikasi, pelatihan metodologi sampai workshop khusus untuk mahasiswa pascasarjana yang menghubungkan antara mahasiswa, dosen muda dengan ilmuwan politik yang berbasis keanggotaan dari lebih 200 universitas dan pusat studi dan 5000 anggota individual (Berndtson, 2012).

Pada tahun 1949, Unesco berinisiatif mendirikan International Political Science Association (IPSA) untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan disiplin ilmu politik di Amerika Utara dan Eropa Barat dengan berbagai belahan dunia lainnya. IPSA menggelar kongres setiap tiga tahunan yang merangkul partisipasi lebih dari 3000 ilmuwan politik dari seluruh dunia. Penyebarluasan profesi ilmu politik diikuti dengan penerimaan atas standar akademik yang kurang lebih sama di seluruh dunia. Beberapa hal penting yang menjadi standar antara lain: proses pembangunan body of knowledge disiplin ilmu politik yang koheren. Proses ini diperoleh dengan cara seperti rekrutmen sarjana politik untuk menduduki posisi ilmuwan di universitas, pelatihan dan sertifikasi oleh lembaga yang diakui, isu seputar pengajaran dan penelitian, peer review dalam publikasi dan kontribusi disiplin ilmu politik terhadap masyarakat pembelajar (learning societies) (Norris, 1997, p. 19).

Inggris mempunyai resistensi terhadap pendekatan yang datang dari luar. Mereka ingin tetap mempertahankan karakteristiknya yang bersifat eklektik dan bersedia menerima perubahan jika dianggap penting untuk memajukan tradisinya (Goldsmith & Grant, 2007, p. 382). Masuknya tradisi baru dengan penggunaan metode kuantitatif di universitas-universitas Inggris sudah dimulai akhir tahun 1960-an dan saat ini mempunyai basis yang kuat di Universitas Essex (Boncourt, 2007, p. 283). Belakangan sejak awal tahun 2010, di Universitas Oxford didirikan program Q-Step yang terorganisir oleh Department of Politics and International Relation dengan pelibatan professor sosiologi politik seperti Geoffrey Evans dan Tom Snijders dari Department of Statistics. Di negara-negara Eropa Utara, benih pengembangan studi ilmu politik sudah dimulai sejak tahun 1950-an (Pedersen, 1997, p. 225). Di negara-negara Baltik pasca Soviet dimulai di Estonia dan diperkuat dengan kembalinya Rein Taagepera dari Amerika dan mengajar di Universitas Tartu. Sekalipun di Eropa Daratan dan Inggris sudah mengembangkan studi politik sebagai disiplin ilmu tersendiri, sebagian besar kalangan akademisnya tetap berinteraksi dengan Amerika. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya akademisi Eropa yang menjadi anggota American Political Science Association (APSA). Sampai tahun 2012, terdapat 335 orang anggota dari Inggris dan 207 dari Jerman, Perancis sebanyak 52, Swiss 69, Italia 48 selebihnya berada dibawahnya (APSA, 2012, p. 354).

¹ Lihat dalam laman ecpr di <https://ecpr.eu/AboutUs/History>

Profesionalisasi menghasilkan wajah disiplin ilmu politik yang semakin heterogen. Terutama persentuhan antara tradisi Eropa dan Amerika yang mendominasi body of knowledge ilmu politik di belahan dunia yang lain. Misalnya, di Amerika, banyak dipengaruhi oleh liberalisme klasik yang menitikberatkan individu sebagai pusat analisis. Mulai dari teori politik Madisionian, metode behaviorisme dan analisis rational choice. Sebaliknya, di Eropa, banyak mengikuti konsepsi ideologis yang bervariasi dan merefleksikan tradisi budaya politik Eropa yang terbagi-bagi (Norris, 1997, p. 21). Meskipun diberbagai belahan dunia lainnya terdapat percobaan untuk membuat tradisi-tradisi baru, namun secara umum, apa yang berkembang dari disiplin ilmu politik di Amerika Utara dan Eropa Barat tetap menjadi rujukan dan standar bagi kawasan lainnya.

Konsep kunci

Kekuasaan: Formasi dan pemerintahan

Apa yang membedakan antara politik sebagai sains dengan filsafat dan teori? Bagaimana melihat dunia politik sebagai hal yang bisa dikenali kecenderungan, pola, model dan hukum-hukum yang melingkupinya? Tentu saja dunia politik menjadi bagian dari dunia sosial karena ada manusia dan segenap relasi antara gagasan, perilaku dan dominasi. Namun dunia politik dalam pandangan teori politik dipahami sebagai idealitas. Cara pandang dunia politik dipenuhi oleh doktrin, norma dan persepsi sehingga penjelasan terhadap berbagai gejala, fenomena dan perubahan selalu mengikuti kehendak preskripsi subyektif. Membangun objektivitas terhadap realitas empirik menjadi landasan bagi segenap cara atau metode untuk menjelaskan atau memahami dari sisi normatif terhadap sebuah realitas atau dunia politik.

Terminologi “politik”, secara minimal merujuk pada definisi setiap tindakan manusia dan keputusannya yang berdampak pada keseluruhan komunitas atau beberapa porsi terpenting dari komunitas tersebut (Gerring & Yesnowitz, 2006, p. 113). Dalam konsep Weberian, posisi seseorang dalam politik praktis misalnya, berbeda dengan ketika orang yang sama memberikan analisis mengenai struktur politik dan posisi partainya. Atau ketika berbicara mengenai demokrasi di dalam rapat partainya, seseorang tersebut tidak bisa membiarkan posisinya. Analisisnya tentu bukanlah terkategori ilmiah namun lebih berdimensi strategis untuk memperoleh suara.

Kekuasaan, dalam definisinya yang paling luas, menjadi obyek sentral dan merupakan inti dari dunia politik yang ingin dikaji secara empirik. Dunia politik merupakan bagian dari realitas sosial yang berurusan dengan aktualisasi dan pencerapan filosofis, kendali moralitas yang mengandaikan idealitas menjadi tema utama yang memberikan jaminan terhadap bekerjanya kekuasaan. Kendatipun demikian, ilmu politik berurusan dengan usaha-usaha penyelidikan ilmiah untuk memahami dan menjelaskan dengan berbagai cara yang secara metodologis bersifat plural. Artinya, tidak ada metode tunggal untuk menjelaskan dunia politik. Ataupun juga teori dan pendekatan yang tidak bisa dibantah untuk memahaminya.

Secara umum, tubuh kekuasaan bisa dilihat dari berbagai perspektif, seperti dari budaya politik, gerakan sosial, perkembangan kelembagaan, perilaku aktor dan aspek-aspek lainnya seperti biopolitik. Diagnosa terhadap berbagai persoalan seputar kekuasaan bermuara pada dua variabel yakni proses formasi pembentukan kekuasaan meliputi: muasal diperolehnya sebuah otoritas, klaim formal legitimasi, konflik dan kompromi sampai relasi antar aktor dan institusi. Selain itu, variabel kedua adalah lembaga pemerintahan dimana aktualisasi kekuasaan menemukan ruang manifestasi yang bisa diobservasi secara fisik, dikenali prosedur dan mekanismenya serta diukur hasil-hasil serta dampaknya.

Diskusi dan pembahasan tentang kekuasaan (power) dalam khazanah ilmu sosial mempunyai pengertian yang luas. Dalam pemahaman politik Machiavellian, kekuasaan bisa diartikan sebagai dominasi dan kontrol yang bekerja dengan cara yang halus. Dalam konsepsi Weberian, kekuasaan (*macht*) mencakup juga aturan (*Herrschaft*) yang terhubung dengan otoritas dan koersi yang memungkinkan aktor dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dalam implementasinya di dunia politik, kekuasaan bisa dipahami sebagai partisipasi dalam pengambilan kebijakan (Lasswell & Kaplan, 1950), atau sebuah “potensialitas” yang memang sulit untuk dijumpai dalam verifikasi empiris karena misalnya (A) mempunyai kekuasaan atas (B) dan sejauh mana (A) bisa mendapatkan (B) dengan melakukan sesuatu di mana (B) mungkin tidak melakukan hal yang sama seperti (A) (Dahl, 1957).

Terminologi “politik” (*politics*) atau “tentang politik” (*political*) dipahami sebagai segenap peristiwa yang terjadi di sekitar pengambilan kebijakan pemerintah (Grazia, 1965, p. 24). Pemerintahan merupakan lembaga formal yang semua aturannya mempunyai daya ikat namun sangat tergantung oleh pengaruh dari berbagai faktor misalnya modal, tekanan publik, perubahan teknologi, gerakan sosial dan sebagainya. Hal tersebut membuat lembaga formal tidak steril dari berbagai kepentingan dalam pengambilan dan eksekusi kebijakannya. Dalam pandangan Eastonian, yang menganggap segenap aktivitas yang menjadi representasi dari lembaga dalam membangun tujuan-tujuannya, tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem. Dari perspektif ini, politik adalah sebuah sistem politik yang dicirikan oleh adanya otoritas peng-alokasi nilai terhadap masyarakat. Hal yang membuat berbeda hanya pada bentuk sistemnya saja, namun fungsi dari politik tetaplah peng-alokasi nilai.

Kekuasaan juga dianggap sebagai kontrol politik yang ditopang oleh otoritas, seperangkat regulasi, unsur manipulasi dan perluasan pengaruh pemegang otoritas disertai dengan konsekuensi akan sanksi yang bersifat memaksa. Kekuasaan dalam konteks plural bersifat relatif dan membutuhkan perbandingan. Dalam konsep kekuasaan Dahlian, pertanyaan siapa yang berkuasa? menjadi relatif karena terikat dengan situasi dan kondisi yang bisa berbeda-beda. Misalnya, 1) X menyebabkan Y untuk meneguhkan tindakan Z. 2) A menyebabkan Y untuk meneguhkan tindakan D. 3) A menyebabkan C untuk meneguhkan tindakan D. Bisakah kekuasaan X masih tetap dianggap absolut jika dibandingkan dengan A dalam situasi ke 2 dan 3? Situasi 1 dan 2 disebabkan Y dipengaruhi oleh ketika 2 dan 3 keduanya mempunyai A sebagai pemberi pengaruh (Dahl, 1957, p. 349). Kompleksitas tersebut

membutuhkan upaya penyelidikan ilmiah atau juga pengujian terhadap apa yang ingin kita ketahui dari aktualisasi terminologi kekuasaan itu sendiri.

Wilayah kajian

Selain kekuasaan sebagai inti dalam studi politik empiris, wilayah lain yang menjadi bagian pendukung yang memberikan kontribusi dan pengaruh yang besar berada di wilayah perifer. Beberapa identifikasi dalam wilayah ini antara lain: dinamika masyarakat, sejarah politik, penggunaan teknologi informasi, sampai dengan pergeseran kebudayaan. Terdapat dua wilayah perifer yang bisa berposisi sebagai penopang wilayah inti yakni transformasi sosial yang menekankan pada proses perubahan bentuk, karakteristik dan model interaksi di dalam kehidupan sosial. Transformasi sosial bisa juga masuk dalam obyek kajian sosiologi dan mempunyai irisan dengan dunia politik sepanjang dinamika transformasi dan dampaknya, berhubungan langsung dengan formasi kekuasaan. Selain itu, terdapat wilayah pelembagaan politik yang menjadi perluasan dari implementasi nilai-nilai ideal politik untuk memastikan segenap lembaga politik bisa menjalankan fungsinya dalam kehidupan nyata.

Studi terhadap transformasi sosial berkaitan erat dengan perubahan politik dimana karakteristik, dinamika konflik sampai resistensi dan respon masyarakat memberikan pengaruh terhadap struktur dan lembaga-lembaga politik. Perubahan rezim politik dalam sebuah negara misalnya, melibatkan analisis modernitas yang menjadikan masyarakat memiliki peluang untuk melakukan transformasi pemahaman, tindakan sampai pada pilihan-pilihan politiknya sehingga mempengaruhi jatuh banggunya rezim politik. Selain itu, pola mobilisasi, model gerakan sosial dan penetapan orientasi aktor di dalamnya, menjadi bagian analisis yang bisa memiliki keterhubungan langsung dengan proses politik sehingga menjadikannya interseksi studi sosiologi dan politik.

Budaya politik, bersama ilmu sejarah menjadi bagian penting dalam analisis politik dan menempati peranan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena dan deskripsi yang unik dan khas dari sebuah kelompok dan interaksi kultural yang mereka bangun secara simbolik. Melalui pendekatan historis, ilmu politik mampu menjelaskan secara diakronik dari proses panjang tentang muasal, dinamika dan hal spesifik lainnya yang terkubur oleh tumpukan realitas di masa lalu. Bahkan bagi sebagian ilmuwan politik, historisitas menjadi pendekatan utama dalam studi perbandingan politik yang sukses dalam menjelaskan berbagai fenomena menarik dan menemukan benang merah yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar misalnya tentang revolusi, nasionalisme, sampai kapasitas negara.

Kegagalan dalam menjelaskan motif kolektif sebuah komunitas untuk menentukan pilihan dalam pemilu misalnya, bisa disebabkan oleh kurangnya memberikan perhatian terhadap faktor budaya yang berakar di dalam komunitas tersebut. Bagaimanapun, masyarakat adalah obyek yang tidak statis melainkan terus bergerak dinamis dan berubah. Variabel kebudayaan juga digunakan sebagai

pendekatan dalam ilmu politik seperti penggunaan Morphogenetics yang menjadi kerangka analisis untuk memahami fenomena politik dari perubahan sosial, budaya dan transformasi keduanya. Ilmu politik memahami kebudayaan bukan hanya sekadar nilai, manifestasi dan jejaknya, melainkan sebagai aset yang melekat pada terbentuknya realitas. Studi-studi penting mengenai model kewargaan, kosmopolitanisme sampai politisasi agama, banyak memanfaatkan kerangka analisis budaya untuk memahaminya.

Sekalipun memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu politik, disiplin ilmu ekonomi menjadi fondasi bagi pendekatan *rational choice*. Selain itu, dari sisi metodologi, disiplin ilmu ekonomi juga menyumbang teknik analisis ekonometrik, *game theory*, dan *formal modelling* dalam analisis mengenai pemilu, koalisi, dan kebijakan publik. Kontribusi tersebut hampir disamai oleh Psikologi yang menjadi cikal bakal behaviorisme dalam ilmu politik dan digunakan secara luas dalam mengukur persepsi pemilih, opini publik dan motif personal lainnya dalam kompetisi politik. Selebihnya, analisis ekonomi banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dalam demokrasi, bekerjanya ideologi politik dan kebijakan ekonomi sampai pada kalkulasi pilihan publik yang mempengaruhi keberlangsungan sebuah pemerintahan.

Ilmu politik di Indonesia

Dalam konteks spesifik Indonesia, kajian politik telah berkembang secara dinamis menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu politik di Barat, transformasi sosial politik di belahan dunia lain, pergeseran rezim politik yang terjadi, serta kebutuhan pasar kerja dan industri. Perkembangan tersebut diwarnai oleh orientasi ontologis keilmuan dalam penentuan objek kajian, penggunaan pendekatan teoretis, dan metodologi riset yang digunakan. Kajian politik Indonesia, misalnya, yang diinisiasi oleh lahirnya Cornell Indonesia Project dapat dipandang sebagai tonggak awal berkembangnya tradisi riset yang berbeda dengan tradisi yang berkembang sebelumnya. Warna kuat tradisi Eropa Kontinental yang menempatkan ilmu politik dalam bejana pendekatan hukum, ilmu negara, dan administrasi sebagaimana penempatannya dalam pendekatan kelembagaan lama (*old institutionalism*) mengalami pergeseran mendasar. Di awal tahun 1960-an, misalnya, ilmu politik dan ilmu sosial di Universitas Indonesia ditempatkan dalam rumah Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Perkembangan kuat lahirnya tradisi ilmu sosial yang lebih mandiri di belahan dunia Barat dengan lahirnya tradisi behaviorisme mendorong pemisahan kelembagaan ilmu sosial dengan munculnya Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, kemudian FISIP di UI dan FISIPOL di UGM. Warna behaviorisme yang menempatkan aktor, sejarah, dan empirisme sebagai atribut penting analisis politik tampak menonjol dalam karya-karya awal Cornellians seperti George McTurnan Kahin dan Herbert Feith.

Di awal perkembangannya di era 1950-an, analisis tentang politik Indonesia tidak hanya menjadi wilayah kajian para ilmuwan politik, setidaknya di kalangan Indonesianis. Kahin mengembangkan sebuah tradisi yang mengombinasikan sensitivitas pada aspek budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial



Indonesia, serta menawarkan sebuah analisis yang rinci dan melibatkan aspek sejarah. Wertheim di sisi yang lebih sosiologis menempatkan Indonesia sebagai bagian dari evolusi struktur sosial dalam pendekatan yang lebih Marxian (Lev, 1982, p. v-vi). Sementara pendekatan interpretivist dari Geertz lebih memberikan perhatian pada analisis “the politics of meanings” (Geertz, 1972), merekam pengaruh kultur Jawa terhadap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia (Lev, 1982, p. vi). Perbedaan pendekatan dalam interpretasi politik Indonesia pasca kolonial melahirkan sebuah debat menarik antara Herbert Feith dan Harry Benda mengenai kejatuhan rezim Parlemen di era 1950-an. Feith (1962) memberikan penjelasan tentang berkembangnya konflik dua kelompok elit (*solidarity maker* dan *rationalist/modernist elites*) sebagai penyebab dari kejatuhan rezim demokratis pertama di Indonesia. Di sisi lain, Benda (1964) dengan pendekatan sejarah menilai bahwa kegagalan praktik parlementarisme di Indonesia lebih disebabkan oleh lemahnya fondasi modernisasi khas Barat di Indonesia. Dalam pandangan Benda, kemenangan *elite solidarity makers* (demagog dan nasionalis) lebih dikarenakan asosiasi dan dukungan yang lebih kuat dengan publik di era itu. Secara longgar kita dapat menilai bahwa perbedaan pandangan yang menekankan analisis elite yang kuat dalam penjelasan “*interest-driven*” dengan analisis yang mengemukakan pandangan budaya dan sejarah.

Seiring dengan bermunculannya teori-teori ilmu politik yang berkembang pada era 1960-an, tradisi kesarjaan Amerika dalam studi Indonesia kemudian melahirkan dua corak yang berbeda. Tradisi Kahinian terus berkembang dengan fokus pada penjelasan akan “masalah” yang muncul dalam perkembangan Indonesia, simpati pada nasionalisme Indonesia, serta penggunaan metode sejarah dalam penjelasan mereka (Anderson, 1982, p. 72). Di sisi lain, berkembang juga tradisi fungsionalisme, teori-teori modernisasi, serta kebutuhan untuk membantu kebijakan politik luar negeri Amerika (Anderson, 1982, p. 75). Lebih dari itu, tradisi-tradisi teoritis semakin berkembang seiring dengan lahir dan berkembangnya rezim Orde Baru. Orientasi studi yang berfokus pada negara (*state-centrism*) menjadi ciri khas dari beragam pendekatan teoritis seperti modernisasi, perbandingan politik, neo-marxist dan critical political economy, hingga pendekatan *culturalist*. Lahirlah beragam model teoritis dalam penjelasan mengenai negara Orde Baru, seperti: *state-corporatism*, *neo-patrimonialism*, *bureaucratic authoritarian regime*, *organicist family state*, *Beamtestaat*, dan lain sebagainya.

Dari perkembangan di atas, jelas bahwa studi politik Indonesia telah mengalami pergeseran dari kebutuhan untuk menjelaskan negara baru (*new state*) dengan perangkat metodologi yang bersifat empiris, banyak meminjam analisis sejarah, model narasi dan deskripsi yang menuntut penguasaan pengetahuan ideografis seorang sarjana ilmu politik, dan dalam banyak aspek lebih bersifat ateoretis. Pergeseran terjadi dengan hadirnya kajian-kajian politik yang lebih *engage* pada teori-teori ilmu politik dengan beragam model analisis, seiring dengan penguatan negara Orde Baru. Di era 1990an mulai marak studi-studi dan wilayah kajian yang menyertakan analisis mengenai demokratisasi dan memberikan perhatian pada aktor non-negara. Seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru,

perkembangan studi politik menjadi lebih polisentrik dan secara perlahan tidak lagi menjadikan negara sebagai objek kajian dominan dalam studi politik Indonesia (van Klinken, 2001). Wilayah kajian yang makin beragam menghasilkan interaksi ilmu politik dengan disiplin ilmu lainnya secara lebih intens. Pendekatan-pendekatan dalam kajian politik Indonesia melahirkan sebuah “*messy center*” yang berkembang sepanjang tiga generasi kalangan sarjana yang disebut sebagai “*mainstream eclecticism*” atau pendekatan *interpretivist* (Aspinall, 2014, p. 241; Liddle, 2014). Di sisi lain, pendekatan *critical political economy* tetap relevan dan merawat tradisi kesarjanaan yang kritis dalam menilai perkembangan politik di Indonesia (Aspinall, 2014, pp. 242-243, Liddle, 2014). Di sisi lain, perkembangan ilmu politik positivistik yang Amerika-sentris turut mewarnai perkembangan kajian politik Indonesia dalam beberapa waktu belakangan (Aspinall, 2014, pp. 243-244, Liddle, 2014).

Secara kelembagaan, kajian politik di Indonesia menempuh jalan kelembagaan yang berbeda dan perbedaan ini mempengaruhi juga orientasi keilmuan dan profesionalnya masing-masing. Di perguruan tinggi, ilmu politik berkembang sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki nomenklatur dan standar yang baku dalam aspek masukan, proses dan luarannya. Kami tidak membahas mengenai berbagai lembaga, aktivisme dan *think tank* yang sudah berdiri sebelum tahun 1998 yang juga membawa nilai, semangat, metode dan terapan disiplin ilmu politik. Mereka juga memiliki tokoh, forum dan publikasi yang menggunakan ilmu politik sebagai alat bantu. Kami hanya fokus pada disiplin ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi dimana kajian politik secara formal dipelajari di Program Studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.

Sebagian kecil program studi ini berdiri sejak dekade 1950-1960-an di masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967), beberapa berdiri di era Orde Baru (1967-1998), dan sebagian besar yang lain berdiri setelah reformasi 1998. Tiga program sarjana Ilmu Politik atau bernama Ilmu Pemerintahan berdiri di era Soekarno, yaitu UNAS (1949), UGM (1955), dan UI (1962) dan 8 (delapan) berdiri di era Orde Baru (1967-1998), yaitu UNDIP (1968), UNHAS dan UNRI (1980), UNAIR (1982), UNSRAT (1984), STISIPOL Candradimuka (1985), UNJANI (1992) dan UNAND (1997). Sebelum Orde Baru, fokus kajian ilmu politik dan pemerintahan terletak pada studi mengenai pengelolaan pemerintahan dan bertujuan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang mengisi berbagai pos di lembaga pemerintahan. Tidak jauh berbeda dengan pendirian program baru di masa Orde Baru, kebutuhan untuk agensi pemerintahan masih mendominasi. Setelah reformasi 1998, terjadi “ledakan” jumlah program studi baru dimana perluasan wilayah studi bukan hanya pengelolaan pemerintahan saja, melainkan meluas pada studi mengenai kekuasaan secara umum. Diversifikasi lapangan kerja juga semakin beragam dengan pilihan yang lebih terbuka di sektor swasta, lembaga asing dan lembaga politik kemasyarakatan. Dari tabel 1 terlihat bahwa pendirian program studi ilmu pemerintahan dilakukan lebih banyak dibandingkan ilmu politik. Kebutuhan akan tenaga tenaga pengelola lembaga pemerintahan dan bentuknya yang aplikatif cenderung lebih tinggi.

Tabel 1 Periode pendirian Program Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan

Program Studi	Masa Pendirian		
	Pra Orde Baru	Era Orde Baru	Pasca Reformasi
Ilmu Politik	2	2	71
Ilmu Pemerintahan	2	5	137

Berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sampai tahun 2025, total program studi ilmu politik/pemerintahan se-Indonesia berjumlah 190 Program Studi yang terdiri dari jenjang S1 sebanyak 145 Program Studi, jenjang S2 sebanyak 35 Program Studi dan jenjang S3 sebanyak 10 Program Studi. Sedangkan menurut data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) sampai tahun yang sama, terdapat 175 Program Studi yang menawarkan pendidikan sarjana ilmu politik/pemerintahan, 36 Program studi tingkat magister/master dan 9 Program Doktoral di seluruh Indonesia. Selisih jumlah Program Studi Ilmu Politik/Pemerintahan di PDDIKTI dan BANPT ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kategorisasi dan kriteria antara dua sumber data utama ini. Terlepas dari perbedaan jumlah dari berbagai sumber data resmi tersebut, perkembangan keilmuan bisa dilihat dengan jelas. Jumlah jenjang sarjana diikuti oleh magister dan doktoral menunjukkan kenaikan signifikan. Mengacu pada data PDDIKTI, jumlah program studi jenjang doktoral sebanyak 10 buah sehingga menunjukkan secara kuantitas, disiplin ilmu politik memiliki peran dalam pengembangan ilmu sosial.

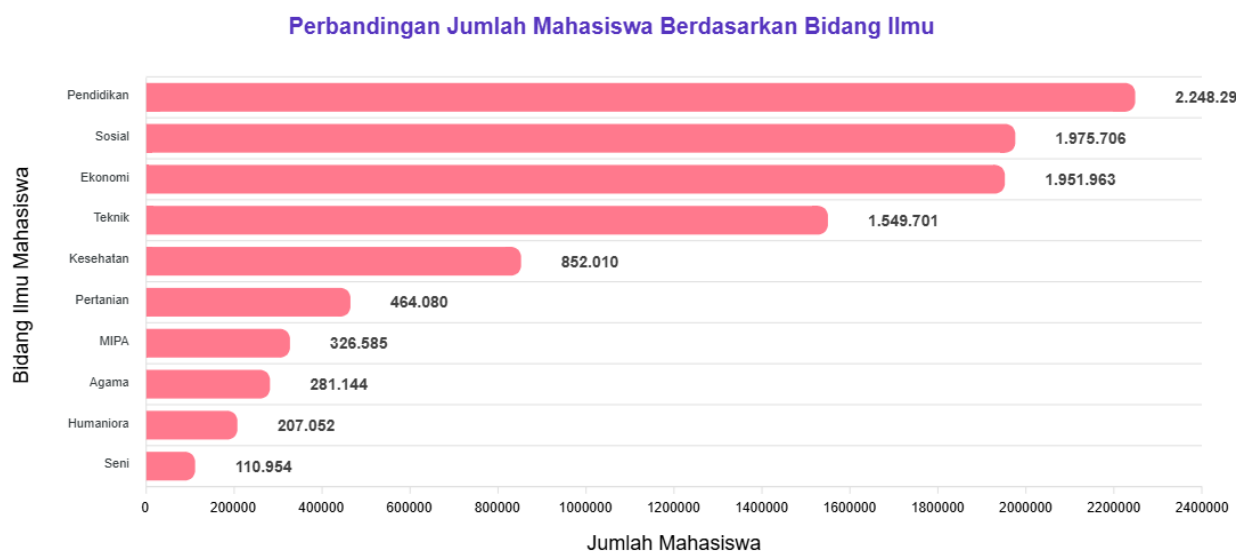
Tabel 2 Jumlah Program Studi Ilmu Politik/Pemerintahan di Indonesia

Strata Pendidikan	Jumlah Program Studi			
	PDDIKTI	BANPT	KAPSIPI	APSIPOL
S1	145	175	83	62
S2	35	35	8	3
S3	10	9	NA	-
Total	190	219	91	65

Dalam tabel 2 bisa dilihat bahwa tidak semua program studi yang ada, tercatat dan tergabung dalam asosiasi profesional seperti KAPSIPI dan APSIPOL. Bahkan tidak sampai separuhnya. Ini menunjukkan bahwa standardisasi muatan kurikulum, hubungan akademik seperti pertukaran pelajar dan dosen, belum berjalan dengan masif dan merata. Tentu saja faktor penyebabnya belum jelas. Apakah sosialisasi dari asosiasi-asosiasi tersebut kurang menjangkau sampai pada keengganan pengelola program studi untuk terlibat dalam asosiasi. Untuk program doktoral belum terlihat satupun program studi yang bergabung. Upaya untuk memastikan standar mutu, terutama pada aspek kompetensi lulusan ilmu politik dan pemerintahan sudah dalam jalur yang menjanjikan. Dari sisi jumlah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1, jumlah program studi ilmu politik dan pemerintahan dalam semua jenjang ini setara dengan 4,58% dari total 4.807 Program Studi Ilmu Sosial yang tercatat di PDDIKTI. Dari sisi popularitas, masih cenderung sedikit sehingga kebutuhan untuk memberikan

kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan politik dengan keterlibatan lulusannya dalam berbagai institusi non-negara masih sangat terbuka.

Jumlah mahasiswa ilmu politik/pemerintahan yang aktif dari jenjang S1 sampai S3 berkisar antara 50.000-70.000 orang atau setara dengan 3,5% dari total 1.976.706 orang mahasiswa bidang ilmu sosial. Diantaranya terdapat jumlah lulusan ilmu pemerintahan sebesar 361.237 orang dan ilmu politik sebanyak 67.292 orang. Jumlah tersebut masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan profesional yang mengisi berbagai posisi didalam bidang-bidang kerja yang terkait dengan lembaga-lembaga politik, penghubung dan analis di perusahaan sampai pos-pos pemerintahan. Dari gambar 2, didalam perguruan tinggi non-keagamaan, tampak bahwa ilmu sosial menempati urutan kedua setelah bidang ilmu pendidikan dan jauh lebih banyak daripada bidang ilmu sains dan kesehatan.



Gambar 2 Perbandingan Jumlah Mahasiswa berdasarkan Bidang Ilmu

Di tingkat kelembagaan, terdapat dua asosiasi yang menjadi wadah bernaung bagi para pengelola Program Studi Ilmu Politik/Pemerintahan, yaitu Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) dan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL). Untuk wadah individu, para akademisi/dosen bidang kajian ilmu politik baik yang mengajar di Program studi sejenis memiliki dua wadah utama, yaitu Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia (ADIPI). Sedangkan di luar kampus, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) menjadi wadah profesional bagi akademisi dan praktisi. Selain itu terdapat asosiasi diluar profesi dosen dan menampung para peneliti ilmu politik seperti Perkumpulan Penelitian Politik Indonesia (P3I/CIPR) yang didirikan pada tahun 2014 oleh sejumlah dosen ilmu politik dari berbagai universitas dan peneliti dari beberapa lembaga seperti LIPI dan CSIS².

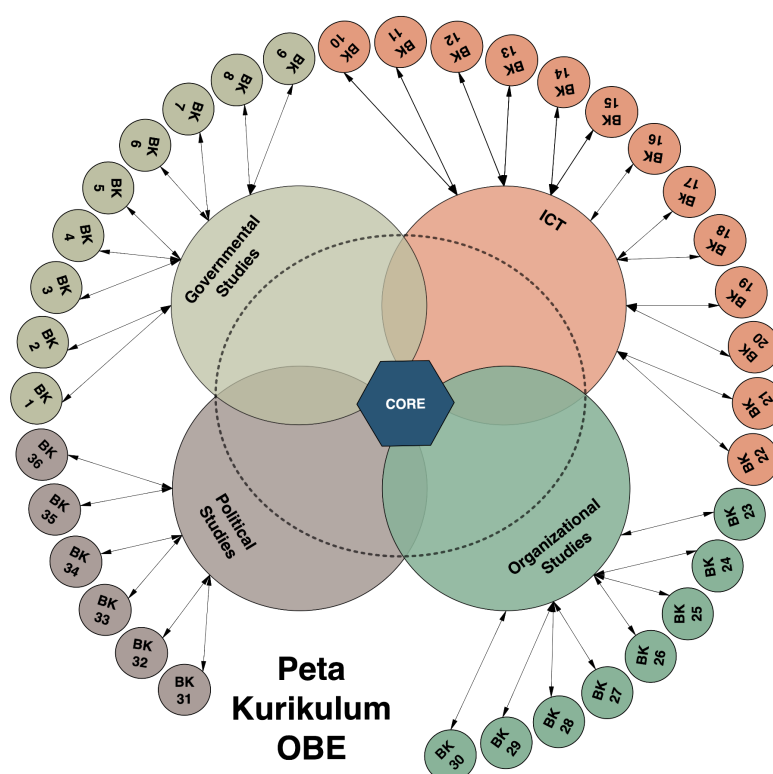
² Lihat laman cipr di <https://cipr.or.id/sejarah/>

KAPSIPI berdiri pada tahun 2014 di Bandung atas inisiatif dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran. Dari 110 Program Studi Ilmu Pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia, KAPSIPI saat ini memiliki kurang lebih 70 anggota aktif. Sebagai kumpulan program studi sejenis dan menyesuaikan diri dengan tuntutan standarisasi nasional, KAPSIPI memiliki konsen pada pengembangan kurikulum program studi sejenis di seluruh Indonesia. Asosiasi keilmuan ini merumuskan empat inti kajian dan 36 bahan kajian pengembangan. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2, empat inti kajian ilmu pemerintahan terdiri dari studi terkait pemerintah dengan 9 bahan kajian, studi organisasi dengan 8 bahan kajian, politik dengan 6 bahan kajian serta informasi, komunikasi dan teknologi dengan 13 bahan kajian. Seperti KAPSIPI, APSIPOL juga berdiri atas inisiatif para pengelola program studi ilmu politik. APSIPOL berdiri di Malang pada November 2016 atas inisiatif bersama Program Studi Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Brawijaya. Deklarasi pendirian sekaligus Musyawarah Nasional pertamanya dihadiri kurang lebih 30 Program Studi Ilmu Politik seluruh Indonesia. APSIPOL saat ini menaungi 65 Program Studi Ilmu Politik seluruh Indonesia dengan 55 diantaranya adalah anggota aktif. 65 Program Studi anggota tersebar dalam empat koordinator wilayah, yaitu KORWIL I meliputi area Sumatera dan Bangka Belitung sebanyak 14 anggota, KORWIL II meliputi wilayah Banten, Jakarta Raya dan Jawa Barat sebanyak 19 anggota, KORWIL III meliputi wilayah Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur berjumlah 15 anggota, serta KORWIL IV yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebanyak 17 anggota.

Sementara itu, AIPI adalah asosiasi profesi ilmu politik paling tua yang pernah ada di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 17 Januari 1985 atas inisiatif dari beberapa ahli ilmu politik terkemuka Indonesia, seperti Prof. Dr. Alfian dan Prof. Dr. Miriam Budiardjo. Sebagaimana namanya, AIPI sepertinya terinspirasi dari model kelembagaan American Political Science Association (APSA) di Amerika. Pada awal berdirinya, AIPI disokong oleh ahli-ahli ilmu politik yang bekerja di P2P LIPI, Universitas Indonesia dan Universitas Nasional Jakarta. Sejak awal pendiriannya, AIPI terlibat aktif dalam menyelenggarakan seminar, publikasi dan advokasi kebijakan terkait politik. AIPI memiliki 27 cabang yang tersebar di beberapa ibukota provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Beberapa cabang yang aktif ada di kota-kota seperti Jakarta, Padang, Manado, Semarang, Banjarmasin, Makassar, Kendari, Bangka Belitung, dan Surabaya. Pada Kongres AIPI ke-10 di Hotel Sahid Jakarta, terpilih Prof. Alfitra Salam, seorang peneliti politik senior di LIPI menjadi Ketua Umum PP AIPI periode 2019-2023.

Berbeda dengan ADIPSI dan ADIPI yang keanggotaannya eksklusif bagi para akademisi dan pengajar di kampus, keanggotaan AIPI terbuka luas bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tidak hanya Ilmu Politik/Pemerintahan tapi juga Hubungan Internasional dan Administrasi Publik di semua jenis profesi atau bidang pekerjaan. Meski inspirasi pendiriannya berasal dari model kelembagaan

APSA di Amerika, tapi kondisi sosial politik, budaya akademik, dan lemahnya komunitas epistemik di Indonesia membuat AIPI lebih memerankan diri seperti event organizer acara daripada asosiasi profesi yang kuat. Menjamurnya asosiasi keilmuan pasca reformasi yang berasal dari inisiasi para pengelola program studi ilmu politik/pemerintahan menunjukkan kekecewaan terhadap AIPI secara kelembagaan dan kontribusi keilmuannya dalam mengembangkan ilmu politik, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Nyatanya, upaya membangun sinergi yang pernah diwujudkan dalam Munas APSIPOL II di Purwokerto tidak lagi berlanjut.



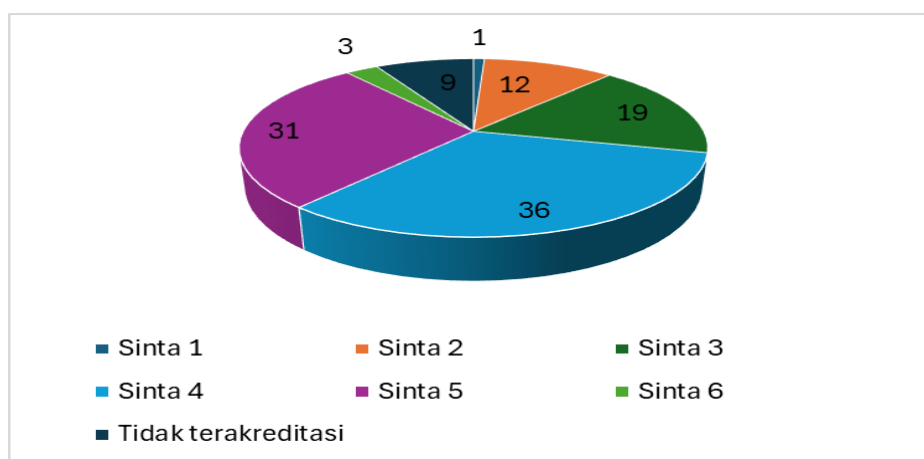
Gambar 3 Peta Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan

Perhatian pada pengembangan kurikulum ditunjukkan APSIPOL dengan merumuskan 9 (sembilan) *Body of Knowledge* pada Juni 2025. Sembilan BOK ini terdiri dari teori politik, metodologi politik, politik Indonesia, perilaku politik, perbandingan politik, ekonomi politik, kebijakan publik, institusi politik serta teknologi dan politik. Rumusan BOK ini adalah hasil kompromi dan konsensus yang lahir dari beberapa putaran pembahasan yang melibatkan beberapa ilmuwan politik Indonesia sejak pertengahan Februari sampai Mei 2025. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam pembahasan diantaranya adalah Purwo Santoso (UGM), Panji Anugrah (UI), Caroline Paskarina (UNPAD), Sofa Marwah (UNSOED). Kompromi karena rumusan BOK ini menjadi jalan tengah dari pandangan yang di satu sisi menolak dan bahkan curiga terhadap tuntutan formalisasi ilmu dari rezim akreditasi nasional

dan pandangan lain yang menginginkan standarisasi yang diformalkan oleh asosiasi keilmuan. Lebih dari itu, rumusan BOK juga merupakan konsensus bersama untuk mewadahi keragaman bahan kajian yang ditawarkan oleh Program Studi Ilmu Politik di seluruh Indonesia tanpa mengabaikan kebebasan setiap Program Studi untuk merancang bahan kajian sesuai kekhasan masing-masing.

Debat keserjanaan antar para akademisi dilakukan dalam berbagai jurnal nasional yang dikelola di tingkat program studi/fakultas di seluruh Indonesia. Hasil penelusuran di database SINTA, terdapat 111 jurnal yang cakupannya membahas isu sosial politik dan pemerintahan dengan status akreditasi dan dampak yang beragam. Menariknya, dari 111 jurnal yang ada sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3, hanya satu jurnal yang dikelola oleh asosiasi, yaitu JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah dan dikelola oleh KAPSIPI. Dari gambar 4 terlihat peningkatan kualitas jurnal yang diterbitkan oleh program studi.

Paling tidak di peringkat Sinta 1 sampai 3 terdapat S1 (1 jurnal), S2 (12 jurnal) dan Sinta 3 (19) jurnal. Sedangkan selebihnya, tengah dalam proses pemantapan yang memungkinkan semua hasil-hasil penelitian ilmu politik mendapatkan ruang yang lebih kompetitif dengan kualitas yang lebih baik. Kendatipun dari sisi diskusi dan perdebatan substansial masih belum tampak karena masing-masing jurnal masih terpaku pada artikel-artikel mandiri yang mereka terbitkan sehingga karakter utama dari arus riset yang mengemuka dalam sebuah periode, belum banyak dipotret. Isu-isunya masih sangat kabur dan kesana-kemari sehingga dialog, debat dan dialektika terhadap isu-isu utama riset dalam periode tahun tertentu belum terlihat menjadi arus utama.

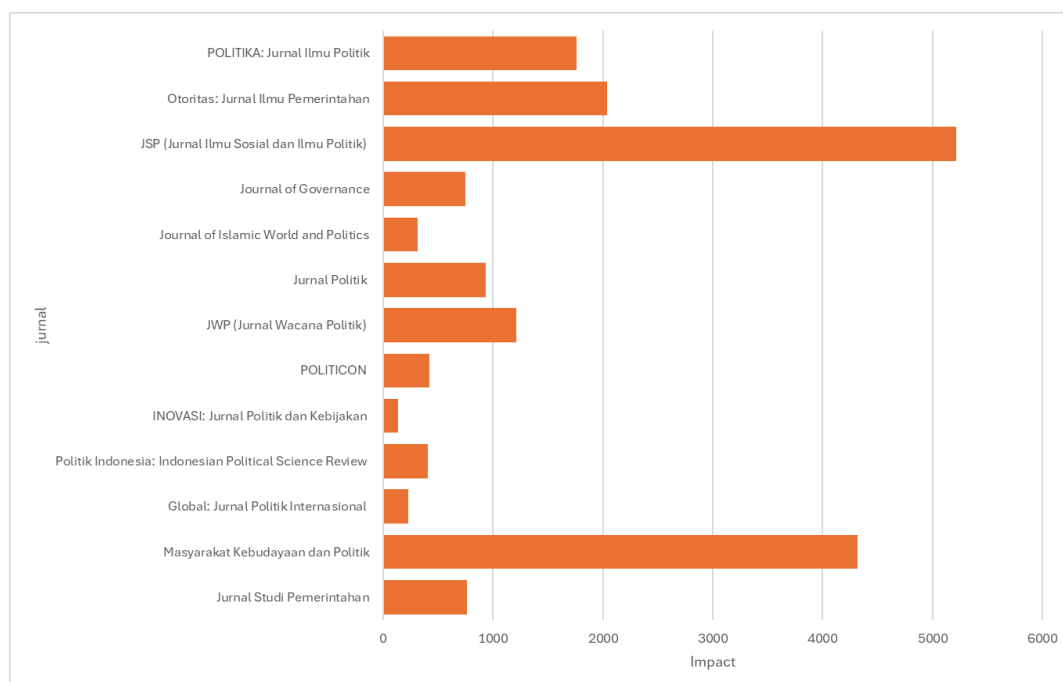


Gambar 4 Peringkat jurnal bidang Sosial Politik di Indonesia 2025

Sumber: Diolah dari data SINTA <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/index/>

Dari sisi impact factor, terdapat dua jurnal yang paling menonjol yaitu Jurnal JSP terbitan UGM dan Masyarakat Kebudayaan dan Politik terbitan Unair yang sudah berdiri jauh lebih lama. Diantara jurnal yang 13 jurnal yang memiliki nilai besar dalam gambar 5, memiliki keragaman isu, mulai dari politik internasional, politik Islam, pemerintahan dan kebijakan publik. Jika dilihat pembagian BoK yang

dilakukan oleh APSIPOL misalnya, tingkat keragaman jurnal masih belum banyak mencerminkan spesialisasi. Kajian perbandingan politik, ekonomi politik, perilaku politik dan teknologi belum banyak terwadahi dalam satu kajian tematik yang memiliki peminat besar. Hal ini menjadi pekerjaan penting dimasa yang akan datang untuk membuat jurnal lebih terspesialisasi karena memang para sarjana dan ilmuwan politik yang melakukan penelitian dibidang-bidang tersebut sudah banyak.



Gambar 5 Jurnal Sinta 1 dan 2 dengan Impact Faktor tertinggi di Sinta

Source: Database Sinta <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/index/>

Perkembangan ilmu politik dalam *setting* berbeda di lingkungan kampus dan luar kampus berdampak pada kontribusi yang berbeda dalam perumusan dan penentuan agenda kebijakan publik di Indonesia. Di kampus, kontribusi ilmu politik dalam perumusan agenda kebijakan publik biasanya dimonopoli oleh kampus-kampus besar dengan Program Studi Ilmu Politik/Pemerintahan yang sudah lama dan mapan seperti UI, IIP, UGM, dan UNAIR. Di awal reformasi, akademisi politik/pemerintahan dari kampus-kampus ini terlibat aktif dalam merancang perumusan Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemilu, dan Partai Politik. Ryas Rasyid dan Andi Mallarangeng, dua orang ilmuwan berbasis kampus menjadi perancang penting beberapa kebijakan politik Presiden Habibie (1998-1999) seperti UU Otonomi Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Keduanya juga menjadi arsitek penting perumusan UU Partai Politik dan UU Pemilu. Di UGM, Affan Gaffar, Riswandha Imawan, Cornelis Lay juga punya kontribusi penting bersama koleganya dalam membantu merancang UU bidang politik di era awal reformasi. Di kampus lain, beberapa ilmuwan politik tidak hanya terlibat dalam merancang beberapa regulasi bidang politik tapi bahkan terlibat langsung dalam beberapa

lembaga politik penting era reformasi seperti KPU, seperti Nazaruddin Syamsuddin, Valina Singka Subekti (UI), dan Ramlan Subakti (UNAIR).

Kontribusi ilmuwan politik berlatar belakang kampus dalam perumusan kebijakan bidang politik dimungkinkan karena *landscape* politik yang berubah pasca reformasi dan tingginya harapan masyarakat terhadap perbaikan sistem politik, baik di tingkat nasional dan lokal. Pun demikian, kontribusi para ilmuwan ini tidak semata karena kapasitas keilmuan mereka masing-masing, tapi juga karena jejaring kultural dan ikatan intelektual organik dengan kekuatan politik penting yang sudah terbangun sejak mahasiswa. Kendatipun ada catatan bahwa mereka yang berperan penting dalam menggodok agenda kebijakan politik misalnya, memiliki ikatan emosional kuat dengan presiden karena berasal dari etnis yang sama. Ikatan yang lebih bersifat emosional dan personal ini sekaligus menunjukkan kelemahan secara kelembagaan asosiasi keilmuan atau profesi ilmu politik di Indonesia dalam perumusan agenda kebijakan publik di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan ilmu politik di Indonesia pada era demokrasi pasca tahun 1998 menunjukkan kemajuan baik dari sisi kuantitas; jumlah program studi, mahasiswa dan tentu saja akademik yang bekerja didalam berbagai perguruan tinggi, lembaga profesional dan penelitiannya. Studi ini menemukan penjelasan penting bahwa demokratisasi membuat ruang-ruang pembelajaran dan riset semakin terbuka dengan diversifikasi riset. Termanifestasi dalam berbagai jurnal yang mengusung bukan hanya teori politik, melainkan juga pada aspek teknis kebijakan. Perluasan wilayah kajian politik yang bukan hanya pada negara dan segenap lembaga-lembaganya, melainkan pada ruang didalam masyarakat sipil hubungannya dengan pasar dan perbandingan internasional. Selain itu, ruang dan situasi politik yang semakin terbuka dan bebas, memungkinkan terbentuknya para profesional yang mengisi ceruk pekerjaan dalam lembaga survei, lobbying, government officer bagi perusahaan, konsultan perencanaan kebijakan sampai peneliti lepas. Dalam konstelasi internasional, perkembangan dan dinamika pendidikan ilmu politik diberbagai perguruan tinggi, mampu merespon segenap perubahan. Fokus kajian, pengembangan kurikulum, referensi perkuliahan sampai literatur mutakhir sebagai bagian dari kebutuhan untuk riset akademik tidak jauh berbeda dengan capaian di kawasan lainnya di Asia Pasifik. Penetapan BoK oleh organisasi profesional, kode etik riset yang diberlakukan oleh lembaga dan perguruan tinggi dan mobilitas antar lembaga yang cepat, terbukti menghasilkan pemerataan kualitas. Dominasi kecanggihan metode riset dan analisis, kebaruan literatur dan akses terhadap pendanaan bukan hanya dinikmati oleh mereka yang ada di perkotaan. Adanya asosiasi profesional memungkinkan terjadinya percepatan pertukaran informasi dan pengetahuan. Interaksi dan perdebatan serta kolaborasi riset dan publikasi.

Studi ini memberikan kontribusi terhadap diskusi mengenai perkembangan disiplin ilmu politik secara global dengan pendalaman pada kasus di Indonesia yang belum banyak diulas. Bagi akademisi di perguruan tinggi, refleksi dari studi ini bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan penguatan aspek pembelajaran, diversifikasi metode dan wilayah kajian yang memberikan ruang bagi obyek kajian yang lebih mutakhir misalnya isu-isu perubahan iklim, migrasi, kelaparan dan kesenjangan distribusi kesejahteraan yang menjadi variabel bagi analisis demokrasi dan relasi kekuasaan serta kinerja tata kelola pemerintahan. Pengkinian kurikulum pembelajaran juga menjadi bagian penting untuk memastikan kontribusi lulusan ilmu politik yang bisa menjalankan fungsi mereka di luar dunia akademis. Sekalipun demikian, artikel ini belum menyentuh pada penjelasan dari analisis empirik yang lebih tepat ukurannya untuk melihat seberapa kuat dampak mobilitas antar sivitas akademika, kolaborasi riset dan pengelolaan jurnal terhadap aspek praktis terhadap alumni yang bekerja di sektor publik dan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A. (2002). *Ventures in political science: Narratives and reflections*. Lynne Rienner Publishers.
- Anderson, B. (1982). Perspective and method in American research on Indonesia. In B. Anderson & A. Kahin (Eds.), *Interpreting Indonesian politics: Thirteen contributions to the debate*. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project.
- Aspinall, E. (2014). Researching Indonesian politics: Three generations, three approaches, and three contexts. In E. Tagliacozzo (Ed.), *Producing Indonesia: The state of the field of Indonesian studies*. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Benda, H. J. (1964). Democracy in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 23(3), 449–456.
- Berndtson, E. (2012). European political science(s): Historical roots of disciplinary politics. In *The world of political science: A critical overview of the development of political studies around the globe: 1990–2012* (pp. 41–65).
- Boncourt, T. (2007). The evolution of political science in France and Britain: A comparative study of two political science journals. *European Political Science*, 6(3), 276–294.
- Dahl, R. A. (1957). The concept of power. *Behavioral Science*, 2(3), 201–215.
- Dahl, R. A. (1961). The behavioral approach in political science: Epitaph for a monument to a successful protest. *American Political Science Review*, 55(4), 763–772.
- Dahl, R. A. (1975). Governments and political oppositions. In *Handbook of political science* (Vol. 3, pp. 115–174).
- De Grazia, A. (1965). *The elements of political science*. Free Press.
- Einstein, A. (1950). *Out of my later years*. Philosophical Library.
- Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Geertz, C. (1972). Afterword: The politics of meaning. In C. Holt (Ed.), *Culture and politics in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Gerring, J., & Yesnowitz, J. (2006). A normative turn in political science? *Polity*, 38(1), 101–133.

- Goldsmith, M., & Grant, W. (2007). British political science in the new millennium. In *The state of political science in Western Europe* (pp. 381–398). Verlag Barbara Budrich.
- Goodin, R. E., & Klingemann, H. D. (1996). Political science: The discipline. In *A new handbook of political science* (pp. 3–49). Oxford University Press.
- Hempel, C. G. (1952). *Fundamentals of concept formation in empirical science*. University of Chicago Press.
- Isaak, A. C. (1981). Generalisation in political science. In *Scope and methods of political science* (pp. 105–132).
- King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research* (Student ed.). Princeton University Press.
- Kramer, G. H., & Weisberg, H. F. (1986). Political science as science. In *Political science: The science of politics* (pp. 11–23).
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. Cleveland/New York.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and society: A framework for political inquiry*. Yale University Press.
- Lev, D. S. (1982). Introduction. In B. Anderson & A. Kahin (Eds.), *Interpreting Indonesian politics: Thirteen contributions to the debate*. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project.
- Liddle, W. (2014). Political science scholarship on Indonesia: Revived but constrained. In E. Tagliacozzo (Ed.), *Producing Indonesia: The state of the field of Indonesian studies*. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Lukes, S. (1974). *Power: A radical view*. London: Macmillan.
- Norris, P. (1997). Towards a more cosmopolitan political science? *European Journal of Political Research*, 31(1), 17–34.
- Ricci, D. M. (1984). *The tragedy of political science: Politics, scholarship, and democracy*. Yale University Press.
- Schmitter, P. C. (2010). Micro-foundations for the science(s) of politics: The 2009 Johan Skytte Prize lecture. *Scandinavian Political Studies*, 33(3), 316–330.
- Seidelman, R. (1985). *Disenchanted realists: Political science and the American crisis, 1884–1984*. State University of New York Press.
- van Klinken, G. (2001). The coming crisis in Indonesian area studies. *Journal of Southeast Asian Studies*, 32(2), 263–268.
- Von Beyme, K. (1982). Modern schools of politics: Western Germany. *Government and Opposition*, 17(1), 94–107.